

PENGEMBANGAN USAHA INTEGRASI SAWIT SAPI: DUKUNGAN LEGISLASI DAN STAKEHOLDER

Development of Integrated Cattle and Oil-Palm Business: Legislation and Stakeholder Supports

Nyak Ilham^{1*}, Ashari¹, IGAP Mahendri², S Wulandari³

¹Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian,
Jln. Tentara Pelajar No.3B, Bogor 16111, Jawa Barat, Indonesia

²Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan,
Jln. Raya Pajajaran Kav. E59, Bogor 16151, Jawa Barat, Indonesia

³Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan,
Jln. Tentara Pelajar No.1, Bogor 16111, Jawa Barat, Indonesia

*Korespondensi penulis. Email: ny4kilham@yahoo.com

Naskah diterima: 17 Februari 2021

Direvisi: 7 April 2021

Disetujui terbit: 19 April 2021

ABSTRACT

The area of oil palm plantations is now reaching 14.7 million hectares, and it is an opportunity for Indonesia to develop an integrated beef cattle industry with the oil-palm integrated system. However, the development of this system is not yet massive. The problem among others is the plantation area owned by the smallholder farmers which is not sufficient for grazing area. To formulate concentrate feeds for the cattle, farmers need supports from palm oil processing companies for its raw materials. This paper is prepared as a literature review aimed at analyzing the prospects and constraints, legal aspects, and stakeholders' role in developing cattle-oil palm integration. This paper concludes that there is ample opportunity to develop an oil palm-cattle integration system. Furthermore, oil palm industry development requires legal aspects, the number of farmers and companies, and the organizations. A policy is needed to develop an oil palm-cattle integration system, coordinated by the Coordinating Ministry for Economic Affairs. The needed policies among others organizing smallholders involved in the integration system for easier access to technologies, extension, livestock health services, and access to feed raw materials such as palm kernel cake and sludge. Sustainability of oil palm-cattle integration efforts in the regions is needed to extend the status of current regulations regarding the integration system from Governor and Regency Regulations into Regional Regulations.

Keywords: *association, integration, oil palm-cattle, prospects*

ABSTRAK

Luas perkebunan kelapa sawit mencapai 14,7 juta ha merupakan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan industri sapi potong dengan sistem integrasi sawit sapi. Namun pengembangannya hingga saat ini belum masif. Permasalahannya adalah luas kebun yang dimiliki petani belum memadai dijadikan area penggembalaan. Untuk meramu pakan formula, peternak membutuhkan dukungan pasokan bahan baku bungkil inti sawit dan lumpur sawit dari perusahaan pengolahan kelapa sawit. Tulisan ini merupakan tinjauan literatur yang bertujuan menganalisis prospek dan kendala, aspek hukum dan peran pemangku kepentingan dalam pengembangan usaha integrasi sawit sapi. Kesimpulan tulisan ini adalah usaha integrasi sawit sapi berpeluang besar untuk dikembangkan. Aspek legal, jumlah petani dan perusahaan, serta organisasi yang mawadahi aktivitas industri kelapa sawit akan sangat mendukung pengembangan tersebut. Agar usaha ini dapat berjalan sinergis, diperlukan kebijakan untuk pengembangan integrasi sawit sapi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kebijakan yang diperlukan adalah bagaimana mengorganisasikan petani pelaku usaha integrasi sawit sapi agar mudah mengakses teknologi, penyuluhan, layanan kesehatan ternak, dan akses terhadap bahan baku pakan berupa bungkil inti sawit dan lumpur sawit (*sludge*). Untuk kesinambungan usaha integrasi sawit di daerah perlu adanya peningkatan status aturan dari peraturan gubernur dan bupati menjadi peraturan daerah.

Kata kunci: *asosiasi, integrasi, prospektif, sawit-sapi*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,7 juta ha, jauh lebih luas dari lahan perkebunan lain (BPS 2020).

Sebagian besar perkebunan tersebut berlokasi di Sumatera dan Kalimantan. Vegetasi di lahan perkebunan, produk samping tanaman dan industri pengolahan hasil kelapa sawit berpotensi dijadikan sumber pakan ternak sapi. Menurut Ilham (2015), jika 30% saja potensi tersebut

digunakan untuk pakan ternak, akan mampu menampung sekitar 16 juta satuan ternak. Di Malaysia, sistem usaha integrasi sawit sapi merupakan solusi dari keterbatasan padang penggembalaan sapi untuk mencukupi kebutuhan daging sapi lokal dengan harga relatif murah (Ahmad dan Nasir 2020). Lahan perkebunan kelapa sawit yang luas merupakan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan industri sapi potong dengan sistem integrasi sawit sapi.

Menurut Pinardi et al. (2020), program integrasi sawit sapi menawarkan solusi untuk memenuhi kebutuhan ternak (daging sapi) mengingat biomassa sebagai bahan pakan tersedia sepanjang tahun tanpa memandang musim. Selain itu, beberapa jenis gulma yang mengandung unsur nutrisi tinggi dan tahan naungan berpotensi sebagai bahan pakan ternak dapat ditanam di lahan perkebunan kelapa sawit. Diperkirakan pada tahun 2034 program integrasi sawit sapi secara bertahap bisa mencapai hingga 2.150.000 ha. Jika luasan itu tercapai Indonesia akan mampu mencukupi kebutuhan daging sapi nasional dari produksi domestik.

Potensi bahan baku pakan dari industri perkebunan kelapa sawit cukup besar dan teknologi formulasi pakan sudah tersedia, namun pengembangannya dinilai belum masif. Kajian Mayulu et al. (2013) mengemukakan bahwa perkebunan kelapa sawit dan hasil samping industri minyak sawit dapat direkomendasikan untuk pakan ternak ruminansia karena selain jumlahnya yang besar, kandungan nutrisinya pun sesuai untuk ternak ruminansia. Permasalahannya antara lain peternak skala kecil yang juga petani kebun sawit hanya memiliki luas kebun rata-rata 2,0 ha. Luasan tersebut belum memadai dijadikan area penggembalaan. Sementara itu, untuk meramu pakan formula (pakan komplit) dibutuhkan bahan baku bungkil inti sawit (BIS) dan lumpur sawit (*sludge*) yang dihasilkan perusahaan perkebunan pengolahan kelapa sawit. Pengembangan usaha integrasi sawit sapi yang dilakukan peternak skala kecil perlu melibatkan perkebunan skala besar baik milik pemerintah (BUMN) maupun milik swasta agar peternak dapat mengakses BIS dan *sludge* sebagai bahan baku pakan komplit dan dapat mengakses lahan perkebunan sebagai areal penggembalaan sapi.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis prospek dan kendala, aspek legal, dan peran *stakeholder* dalam pelaksanaan usaha integrasi sawit sapi pada perkebunan kelapa sawit. Materi dalam tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian "Meningkatkan *Supply* Daging Sapi dan Kesejahteraan Peternak Rakyat melalui

Sistem Integrasi Sawit-Sapi di Indonesia" yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian bekerjasama dengan ACIAR (LS/2015/048; Indobeef-Palm Cow). Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah tinjauan literatur, yaitu dengan melakukan telaahan berbagai jurnal ilmiah dan sumber lain yang relevan dan terkait dengan pengembangan usaha integrasi sawit sapi. Selain itu, juga dilakukan tinjauan untuk produk legislasi yang telah dikeluarkan pemerintah dalam mendukung upaya tersebut.

PROSPEK DAN KENDALA PENGEMBANGAN INTEGRASI SAWIT SAPI

Luas Lahan Perkebunan Sawit

Perkebunan kelapa sawit dan vegetasi yang berada di bawahnya dapat dijadikan sebagai sumber pakan ternak sapi. Materi yang dapat digunakan sebagai bahan pakan terdiri dari bungkil inti sawit (BIS), lumpur sawit (*sludge*), pelepah dan daun sawit, serta vegetasi di lahan perkebunan sawit (Ilham 2015). Selama 10 tahun terakhir, luas perkebunan kelapa sawit meningkat tajam dari 8,55 juta ha tahun 2010 (BPS 2012) menjadi 14,7 juta ha pada tahun 2019 (BPS 2020). Perkebunan tersebut tersebar di 25 provinsi dengan lima sentra utama di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur.

Manfaat Finansial

Usaha intergrasi sapi sawit dapat dilakukan dengan tiga pola, yaitu intensif, semi intensif, dan ekstensif. Pola intensif, sapi dikandangan terus menerus dan diberi pakan komplit dengan bahan baku utama dari BIS, lumpur sawit dan pelepah daun sawit yang telah dicacah. Pola semi intensif, sapi digembalakan di lahan perkebunan pada siang hari dan kembali ke kandang pada sore hari. Pola ekstensif, sapi digembalakan terus menerus di lahan perkebunan dengan cara dirotasi agar vegetasi di lahan perkebunan sebagai sumber pakan tidak rusak akibat penggembalaan berlebih (*over-grazing*). Sementara, kajian Saifuddin dan Suryadi (2017) di Aceh menyebutkan ada tiga proses dalam pembentukan integrasi sawit sapi, yaitu (1) sistem integrasi secara alami, (2) sistem integrasi kooperatif, dan (3) sistem integrasi intensif.

Menurut Ilham dan Saliem (2011), usaha ternak sapi yang diusahakan secara terintegrasi dengan usaha tani kelapa sawit dengan semi

intensif secara finansial layak dikembangkan dengan nilai *Benefit/Cost* (B/C) antara 1,35–2,67; *Internal Rate of Return* (IRR) berkisar antara 21–29%; *Net Present Value* (NPV) lebih besar dari nol dan lama pengembalian modal 4,91–6,4 tahun. Hasil ini senada dengan penelitian Utomo dan Widjaja (2012); Affandi et al. (2014); Indrayani dan Hellyward (2015); Hidayat dan Hidayat (2017); dan Nur et al. (2018), yang mengatakan bahwa usaha integrasi sawit-sapi dilakukan oleh peternak dan perusahaan swasta memberikan keuntungan ekonomi. Sementara itu, Suadi dan Suryadi (2017) dan Zaimah et al. (2017) menyebutkan program integrasi sawit sapi menghasilkan sejumlah dampak positif kepada masyarakat. Dampak yang jelas adalah dari sisi ekonomi berupa kenaikan pendapatan. Di samping itu, ada dampak positif terhadap meningkatnya pemenuhan kegiatan sosial dan spiritual.

Manfaat Teknis

Kebun kelapa sawit berpotensi sebagai area penggembalaan sapi khususnya ras sapi tropis. Daun kelapa sawit dapat dijadikan sumber pakan pada musim kemarau saat pakan hijauan produksinya menurun. Sapi Bali yang dipelihara di area perkebunan kelapa sawit memiliki produktivitas yang baik (Baliarti et al. 2019). Pemberian pupuk organik cair dan padat dari ternak sapi untuk tanaman kelapa sawit mampu meningkatkan produksi (Bamualim et al. 2015; Ahmad dan Sariffudin 2019; Dahono et al. 2019). Banyak petani menggunakan pupuk kandang dan menurunkan dosis pupuk inorganik dengan dampak meningkatkan pendapatan usaha tani kelapa sawit (Ilham et al. 2016). Usaha integrasi sawit sapi memberikan pengaruh positif dari aspek lingkungan karena pembasmian gulma di perkebunan sawit menggunakan pestisida menjadi berkurang (Saifuddin dan Suryadi 2017; Mahendri dan Sisriyenni 2020).

Tidak semua peternak yang berusaha sapi potong telah melakukan usaha integrasi sawit sapi. Belum diterapkannya teknologi pakan dan pembuatan pupuk organik oleh peternak di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dikarenakan ketidakpahaman peternak tentang pentingnya integrasi sapi sawit sehingga belum mengadopsi teknologi integrasi sawit-sapi (Malik et al. 2017). Oleh karenanya, diperlukan dukungan pemerintah disertai pendampingan yang intensif dan berkelanjutan.

Kendala Pengembangan

Kendala utama pengembangan usaha integrasi sawit sapi di Indonesia adalah masih ada dua pendapat yang berbeda tentang dampak integrasi usaha sawit sapi dengan pola pemeliharaan yang intensif dan ekstensif. Pada satu pihak, ada yang beranggapan keberadaan sapi di lahan perkebunan sawit berdampak negatif terhadap tanaman kelapa sawit. Di pihak lain, ada yang berpendapat usaha integrasi sawit sapi justru menguntungkan kedua usaha.

Menurut Ilham et al. (2014) beberapa kendala pengembangan sistem usaha tani terintegrasi sawit sapi, antara lain adalah (1) adopsi teknologi integrasi sawit sapi masih rendah akibat skala usaha masih kecil dan modal peternak terbatas, (2) peternak di sekitar perkebunan sawit masih kesulitan mendapatkan bungkil inti sawit dari perusahaan karena harus membeli dalam jumlah besar di samping itu pakan tambahan berupa dedak padi harus didatangkan dari luar kawasan perkebunan dan harganya mahal, (3) beberapa pabrik pengolahan kelapa sawit sudah menggunakan teknologi yang tidak lagi menghasilkan limbah padat (solid) tetapi limbah cair, sehingga bahan baku pakan dari solid menjadi berkurang, (4) penggunaan pupuk kandang pada tanaman sawit dapat menggantikan pupuk anorganik dengan tidak menurunkan produksi tandan buah segar (TBS), namun pemberian pupuk kandang yang sembarangan dapat meningkatkan populasi kumbang orites yang dapat bersarang di pucuk sawit dan akhirnya dapat mematikan tanaman sawit.

Sementara itu, Silalahi et al. (2018) menyebutkan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pola integrasi sawit sapi oleh petani skala kecil adalah sulitnya mendapatkan bungkil inti sawit, teknologi pengolahan pakan yang kurang baik, dan sapi yang merusak perkebunan sawit. Sementara itu, untuk usaha berskala besar permasalahannya adalah ternak yang merusak perkebunan sawit, pemasaran, dan kurangnya pemahaman tentang implementasi prinsip integrasi.

Menurut Ilham et al. (2016), masih ada isu di antara peneliti dan praktisi perkebunan kelapa sawit yang berpendapat sapi yang digembalakan di lahan perkebunan kelapa sawit dapat menyebarkan penyakit busuk batang tanaman kelapa sawit yang disebabkan jamur *Ganoderma boninense*, sehingga penggembalaan sapi di lahan perkebunan kelapa sawit tidak dianjurkan. Pendapat ini belum dibuktikan dengan hasil penelitian. Nawfetriyas et al. (2020) menunjukkan bahwa *Ganoderma spp.* tidak ditemukan di feses

sapi yang digembalakan di sistem integrasi sapi sawit. Hasil ini senada dengan Soetopo dan Wulandari (2020) yang menyatakan bahwa beberapa faktor yang membawa spora jamur ini adalah angin, kendaraan, tanah, serangga, hewan, manusia, sedangkan miseliumnya dapat menginfeksi tanaman sehat melalui akar yang menghubungkan antara tanaman sehat dan tidak sehat. Oleh karena itu, sapi-sapi di perkebunan kelapa sawit tidak bisa disalahkan sebagai faktor yang menyebabkan distribusi penyakit ini.

Berdasarkan pengalaman di Malaysia, Ahmad dan Nasir (2020) menyebutkan bahwa adopsi terhadap sistem integrasi sawit sapi dipengaruhi oleh lima dimensi, yaitu ketersediaan modal, biaya adopsi, kesesuaian biofisik, ketersediaan tenaga kerja serta ketersediaan informasi dan pengetahuan. Sementara itu ada empat dimensi kendala adopsi, yaitu produksi dan *on farm*, pemasaran dan ekonomi, teknologi dan mekanisasi, serta dukungan dan kebijakan pemerintah terhadap sistem integrasi sawit-sapi. Faktor yang berperan mengakselerasi adopsi sistem integrasi sapi-kelapa sawit adalah modal kerja, usaha dikelola secara berkelompok, dan adanya dampak peningkatan pendapatan (Andriati dan Rahmawati 2018), serta dukungan bimbingan teknis dan pendampingan manajemen usaha ternak (Saptana dan Ilham 2015).

LEGISLASI Mendukung Usaha Integrasi Sawit Sapi

Usaha integrasi sawit-sapi melibatkan berbagai instansi pusat maupun daerah. Oleh karena itu, agar pengembangannya dapat berjalan berkesinambungan, selain memiliki prospek ekonomi, juga dibutuhkan dukungan legislasi lintas instansi pusat dan daerah. Berikut diuraikan berbagai legislasi yang mendukung pengembangan integrasi sawit sapi baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tingkat Pusat

Menurut Mahendri et al. (2020), pada tingkat pusat ada tiga undang-undang, satu Perpres, dan dua Peraturan Menteri Pertanian yang isinya mendukung dan mengatur pelaksanaan usaha integrasi sawit sapi di Indonesia. Undang-undang yang utama adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Asas dan tujuan UU 18/2009 yang

tertuang pada Pasal 2, ayat (1) menyebutkan: peternakan dan kesehatan hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait. Pada Pasal 6 ayat (4) disebutkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara perusahaan peternakan dan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah. Hal ini berarti, usaha budi daya ternak dapat dilakukan secara terintegrasi dengan budi daya tanaman perkebunan, termasuk antara tanaman kelapa sawit dan sapi potong. Usaha integrasi tersebut dapat diselenggarakan secara mandiri atau kemitraan. Kemitraan usaha budi daya sapi potong milik peternak dapat dilakukan dengan perusahaan di bidang lain, dalam hal ini bidang perkebunan kelapa sawit. Untuk mendapat bahan pakan murah yang bersumber dari usaha perkebunan kelapa sawit, pemerintah kabupaten/kota diamanahkan untuk membina kerja sama kedua bidang usaha tersebut. Perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat menyediakan sarana produksi seperti bahan baku pakan berupa bungkil inti sawit (BIS), solid (*sludge*), daun pelepah kelapa sawit, serta vegetasi di lahan perkebunan.

Undang-undang yang terkait dan mendukung usaha integrasi sawit sapi adalah UU No. 39 Tahun 2014, tentang Perkebunan, pada Pasal 44, ayat (1) disebutkan bahwa usaha budi daya tanaman perkebunan dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil tanaman perkebunan dan/atau budi daya ternak. Pada ayat (3) disebutkan bahwa integrasi usaha budi daya tanaman perkebunan dengan budi daya ternak dan diversifikasi usaha harus mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok. Dalam praktiknya, di Indonesia memang demikian, usaha budi daya sapi potong hanya memanfaatkan produk samping dari usaha perkebunan kelapa sawit dan sebaliknya.

Merujuk pada UU No. 18/2009, diterbitkan Perpres No. 14 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan. Pada Pasal 4 (1) disebutkan bahwa budi daya hewan peliharaan diselenggarakan pada kawasan budi daya hewan peliharaan dan/atau melalui integrasi dengan usaha lainnya. Pasal 8 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa budi daya hewan peliharaan dengan pola intensif, semi intensif, dan ekstensif dapat diselenggarakan melalui integrasi dengan

usaha lainnya. Usaha lainnya mencakup usaha di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan/atau industri pertanian.

Pada tingkat kementerian telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 105 Tahun 2014, tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong (Kementan 2014). Pada Pasal 4 disebutkan integrasi usaha sawit-sapi dapat dilakukan oleh pekebun dan perusahaan perkebunan. Usaha integrasi ini dilakukan untuk dapat memanfaatkan produk samping usaha perkebunan kelapa sawit, dan kotoran sapi sebagai pupuk, *biourine*, dan *biogas* serta manfaat lainnya. Jika hal ini dapat direalisasikan, biaya produksi kedua usaha akan menjadi lebih murah dan penurunan kualitas lahan dapat dikendalikan. Pada Pasal 6 disebutkan integrasi usaha sawit-sapi pada lahan perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha kurang dari 25 ha dilakukan secara intensif atau semi intensif. Pada skala usaha 25 ha atau lebih dapat dilakukan secara intensif, semi intensif, atau ekstensif. Sesuai UU No. 39/2014 di atas bahwa pola budi daya sapi secara ekstensif dan semi intensif dilakukan melalui rotasi dengan jeda waktu paling singkat enam puluh hari sehingga menjamin kecukupan pakan dan tidak merusak kebun kelapa sawit. Sebelum Permentan No. 105/2014 ini terbit, praktek usaha integrasi sawit-sapi dan penelitian terkait usaha integrasi sudah banyak dilakukan. Peluang integrasi usaha tersebut sudah tertulis pada Permentan No. 98 Tahun 2013, tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Kementan 2013). Pada Pasal 35 Permentan No. 98/2013, diberikan peluang pada usaha perkebunan untuk melakukan diversifikasi usaha.

Kementerian BUMN juga menerbitkan Surat No. S-50/D1.MBU/2012, tanggal 22 Februari 2012 tentang Pola Integrasi Peternakan Sapi di Perkebunan Kelapa Sawit dan Surat Menteri BUMN No. S-240/MBU/2012, tanggal 9 Mei 2012 perihal Penugasan Pelaksanaan Program Integrasi Sapi Sawit (Karimy et al. 2014). Dalam surat penugasan tersebut kementerian BUMN mewajibkan seluruh PTPN kelapa sawit memelihara ternak sapi sebanyak 100.000 ekor sapi di 10 PTPN kelapa sawit. Penugasan BUMN tersebut dimaksudkan agar Indonesia mampu mengurangi ketergantungan impor sapi yang cenderung terus meningkat. Namun, hingga kini hasil dari program tersebut belum terlihat dengan jelas.

Tingkat Daerah

Kebijakan nasional mendorong pemerintah daerah mendukung pengembangan usaha integrasi sawit-sapi. Provinsi Riau memberikan dukungan dana APBD (Ilham et al. 2014) dan telah menerbitkan Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (Pemprov Riau 2012). Fahrial et al. (2019) menyebutkan bahwa salah satu program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dikembangkan perusahaan adalah bidang ekonomi kerakyatan, di antaranya adalah usaha *integrated farming system*. Hal ini artinya program CSR yang ada dapat digunakan untuk mengembangkan usaha integrasi sawit dan sapi. Di Kabupaten Siak, dibentuk Forum CSR dan mewajibkan perusahaan perkebunan kelapa sawit, perusahaan minyak, perusahaan kayu dan perusahaan lain untuk membuat program CSR yang diarahkan pada kegiatan usaha integrasi sawit dan sapi potong. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mengarahkan program CSR dan *Community Development* (Comdev) dari sebelumnya bukan dalam bentuk usaha dialihkan menjadi dalam bentuk usaha integrasi sawit dan sapi potong (Ilham et al. 2016).

Merujuk pada Permentan No. 105/2014, Gubernur Bangka Belitung menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 43 Tahun 2019, tentang Integrasi Usaha Sawit-Sapi pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Kep Babel 2019). Pada Pergub ini disebutkan bahwa integrasi usaha sawit-sapi dapat dilakukan oleh pekebun atau perusahaan perkebunan, UPTD yang membidangi fungsi pertanian/peternakan di provinsi, kabupaten/kota dan peternak dengan cara intensif, semi intensif dan ekstensif.

Gubernur Kalimantan Tengah, melalui Pergub No. 43 Tahun 2018 tentang Pengembangan Ternak Sapi Potong melalui Integrasi Sawit-Sawit pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, mewajibkan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk melaksanakan pengembangan sapi potong di lahan usahanya melalui pola integrasi usaha sawit-sapi (Pemprov Kalteng 2018). Integrasi usaha sawit-sapi pada perkebunan dapat dilakukan secara intensif, semi intensif, atau ekstensif.

Kajian Ilham et al. (2016), menemukan bahwa pengembangan kegiatan integrasi sawit sapi di daerah tidak hanya mendapat dukungan APBN, tetapi juga APBD. Daerah tersebut meliputi Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, dan

Provinsi Kalimantan Tengah. Dukungan dana dari daerah tersebut antara lain digunakan untuk kegiatan bimbingan teknis, pengadaan *chopper* rumput, instalasi biogas. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui dana APBD kabupaten selama periode 2012-2016 telah menyebarkan sapi kepada kelompok tani ternak (KTT) sebanyak 2.074 ekor.

Hasil telaahan Permentan No. 105/2014 menunjukkan bahwa ruang lingkup aturan tersebut hanya mencakup integrasi sawit sapi, kemitraan usaha, serta pembinaan dan pengawasan. Bagaimana mengimplementasikan kemitraan antara petani dan perusahaan masih belum diatur. Satu hal yang belum terlihat adalah bagaimana mengorganisasikan pelaku usaha integrasi sawit sapi agar mudah mengakses teknologi, penyuluhan, layanan kesehatan ternak, dan akses terhadap bahan baku pakan berupa BIS dan solid. Demikian juga belum mewajibkan perusahaan besar terlibat mengadakan jumlah ternak sapi pada penguasaan lahan perkebunan tertentu. Terkait dengan aturan di daerah, umumnya masih berupa Pergub dan Perbup. Penerbitan dan implementasi Pergub dan Perbup bisa jadi tidak berkesinambungan karena ketertarikan gubernur dan bupati secara personal berbeda-beda. Legislasi dalam bentuk Perda dinilai lebih berkesinambungan.

KETERLIBATAN PIHAK SWASTA DAN ASOSIASI PENGUSAHA DAN PETANI KELAPA SAWIT

Saat ini organisasi yang ada dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit adalah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI). Bidang-bidang organisasi yang ada masih terbatas menangani kompartemen kehutanan dan perkebunan (GAPKI 2020). Selain itu ada juga Lembaga Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kebijakan pembentukan BPDPKS dilakukan dalam upaya untuk menjaga peran kelapa sawit secara berkesinambungan. Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan: (1) pengembangan sumber daya manusia perkebunan, (2) penelitian dan pengembangan perkebunan, (3) promosi perkebunan, (4) peremajaan perkebunan, dan/atau (5) sarana dan prasarana perkebunan (BPDPKS 2018). Sejauh ini, GAPKI dan BPDPKS kegiatannya belum terkait langsung dengan pengembangan usaha integrasi sawit-sapi.

Penyebaran kebun sawit di Indonesia mencakup 25 provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara. Sekitar 59% luas lahan perkebunan diusahakan oleh perusahaan besar dengan jumlah perusahaan 2.165 unit, atau tiap perusahaan mengusahakan sekitar 4.013 ha. Selebihnya 41% merupakan perkebunan rakyat (BPS 2020). Jumlah rumah tangga usaha petani yang terlibat adalah 1,87 juta unit (BPS 2019) atau rata-rata setiap petani hanya menguasai 3,23 ha.

Pada tingkat petani organisasi yang resmi adalah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) yang merupakan anggota dari Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Republik Indonesia (Gapperindo). Kepengurusan organisasi ini berada pada 22 provinsi dari 25 provinsi yang ada lahan perkebunan sawitnya (Apkasindo 2016). Sejauh ini belum ada dokumen yang menunjukkan Apkasindo juga melakukan pengembangan usaha integrasi sawit-sapi untuk mendukung peningkatan pendapatan anggotanya. Asosiasi ini masih fokus pada usaha tanaman kelapa sawit saja. Ilham et al. (2016) melaporkan bahwa materi pelatihan untuk petani anggota asosiasi yang dibiayai dana BPDPKS belum mengaitkan usaha tani kelapa sawit dengan usaha ternak. Padahal, peran usaha ternak sapi sebagai sumber pendapatan rumah tangga petani saat kebun sawit melakukan *replanting* menjadi penting.

Keterlibatan pihak akademisi pemerintah, swasta, dan masyarakat peduli pengelolaan integrasi sawit-sapi dalam pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan mengenai pengelolaan integrasi sawit-sapi dapat meningkatkan kemandirian petani. Dua kegiatan tersebut dapat meningkatkan daya saing usaha integrasi sawit-sapi dan kesejahteraan petani (Sulistiwati 2018). Hal ini berarti Apkasindo dan asosiasi terkait dapat melakukan pembinaan kepada anggota agar mengembangkan usaha peternakan dengan sistem integrasi dengan usaha tanaman sawit, seperti halnya yang dilakukan di Malaysia.

Usaha integrasi sawit sapi di Malaysia sudah dikembangkan terorganisasi melalui suatu badan yang disebut MPOB (*Malaysian Palm Oil Board*). Badan ini memiliki divisi penelitian dan penyuluhan tentang integrasi sawit sapi yang berada di seluruh Malaysia. Badan ini mendorong agar di antara petani kecil yang melakukan usaha integrasi sawit sapi bergabung dalam wadah koperasi untuk memudahkan melakukan pengelolaan dan pemantauan dari

petugas penyuluhan bekerja sama dengan petugas yang membidangi fungsi layanan peternakan dan kesehatan hewan. Selain itu, koperasi bertugas untuk memastikan pasokan dan aktif dalam pemasaran (Saad dan Azhar 2015).

Menurut Chang et al. (2020) pengembangan integrasi sawit sapi di Indonesia dilakukan oleh peternak dan perusahaan swasta, sementara di Malaysia dilakukan oleh sebagian besar milik perusahaan negara dengan melibatkan petani kecil. Di PNG dilakukan sepenuhnya oleh swasta yang menggunakan bahan baku pakan dari lokasi setempat berupa BIS, lumpur sawit, molase, tepung kopra, tepung gandum, buah kakao, dedak padi, dan bubur kopi. Usaha pembibitan/pembiakan dilakukan dengan pola ekstensif digembalakan secara bergilir di lahan perkebunan. Sejak awal telah dirancang pola tanam kelapa sawit diatur sedemikian rupa sehingga barisan kelapa sawit diselingi padang rumput.

Menurut Hassan et al. (2018), pertanian skala kecil yang melakukan integrasi memanfaatkan beragam sumber daya, dan menghargai keberlanjutannya. Kegiatan integrasi yang dilakukan membantu melestarikan keanekaragaman hayati, mengurangi degradasi lahan, dan memelihara jasa ekosistem berharga lainnya bagi masyarakat (Husnain dan Nursyamsi 2015). Berbagai manfaat ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah untuk memperkuat pertanian skala kecil ini melalui organisasi petani yang lebih baik seperti koperasi, menyediakan akses terhadap pengetahuan dan teknologi berkelanjutan, kemudahan bisnis untuk melakukan kegiatan bernilai tambah tinggi yang menghasilkan pendapatan lebih tinggi dan mempertahankan fungsi ekologis. Petani kecil yang menggabungkan atau merotasi tanaman dan ternak dengan pupuk kandang untuk mengisi kembali kesuburan tanah.

PENUTUP

Berdasarkan luas dan sebaran keberadaan perkebunan kelapa sawit, teknologi formulasi pakan komplit yang tersedia, manfaat finansial, dan perannya memperbaiki kondisi tanah, serta isu *Ganoderma boninense* yang tidak terbukti, memberikan peluang besar untuk mengembangkan industri sapi potong dengan sistem integrasi sawit sapi. Selain aspek teknis, pada aspek legal, jumlah keterlibatan petani dan perusahaan, serta organisasi yang mewadahi

aktivitas industri kelapa sawit memiliki potensi untuk dikembangkan secara terintegrasi dengan usaha peternakan sapi potong. Jika usaha itu ditingkatkan penerapannya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani kebun, menggerakkan perekonomian regional dan nasional.

Berdasarkan manfaat yang diperoleh dan belajar dari MPOB di Malaysia, diperlukan peran pemerintah untuk mendorong PBDPKS mendukung kegiatan usaha integrasi sawit sapi. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah petani dan pengusaha perkebunan kelapa sawit yang diorganisir dalam wadah organisasi tersendiri. Usaha perkebunan kelapa sawit melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Agar usaha ini dapat berjalan sinergis, diperlukan kebijakan untuk pengembangan usaha integrasi sawit sapi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kebijakan yang diperlukan tidak hanya pengaturan yang lebih implementatif tentang bagaimana mengorganisasikan pelaku usaha integrasi sawit sapi agar mudah mengakses teknologi, penyuluhan, layanan kesehatan ternak, dan akses terhadap bahan baku pakan berupa BIS dan solid.

Kesinambungan usaha integrasi sawit terkait juga dengan aturan di daerah. Saat ini aturan yang ada masih berupa Pergub dan Perbup. Penerbitan dan implementasi Pergub dan Perbup bisa jadi tidak berkelanjutan karena dapat diubah bila ada pergantian personal gubernur dan bupati. Legislasi dalam bentuk Perda dinilai lebih berkesinambungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dr. Atien Priyanti dan Dr. Sudi Mardianto yang telah melibatkan penulis dalam kegiatan penelitian yang didanai ACIAR (LS/2015/048; Indobeef-Palm Cow).

DAFTAR PUSTAKA

Affandi MI, Kalsum U, Wardani IK. 2014. Prospek pengembangan sistem integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan sapi untuk meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Lampung Selatan. Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian Politeknik Negeri Lampung; 2014 Mei 24; Lampung, Indonesia. Jakarta (ID): BPPT Press. hlm. 349-355.

- Ahmad AR, Nasir ASM. 2020. The practices and factors affecting the implementation of integrated cattle and oil palm farming system in Malaysia. *Humanit Soc Sci Rev.* 8(4):693-700.
- Ahmad SN, Sariffudin AN. 2019. Pengaruh integrasi ternak sapi dengan kelapa sawit terhadap produktivitas sapi dan kelapa sawit. *J Peternak Nusantara.* 5(1):43-50.
- Andriati, Rahmawati T. 2018. Analisis percepatan adopsi sistem integrasi sapi-kelapa sawit untuk penggemukan sapi potong dengan pendekatan analytical hierarchy process. *J Pengkaj Pengemb Teknol Pertan.* 21(3):11-23.
- [Apkasindo] Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. 2016. Sekilas tentang Apkasindo [Internet]. [diunduh 2021 Feb 2]. Tersedia dari: <https://www.dpp-apkasindo.com/tentang.html>.
- Baliarti E, Maulanai H, Widi TSM, Yulianto MDE, Panjono, Ngadiyono N, Budisatria IGS. 2019 Analisis produktivitas sapi dengan pemeliharaan terintegrasi perkebunan kelapa sawit. Dalam: Negara W, Harianto, Manalu LP, Widyastuti N, editors. *Prosiding Integrated Cattle and Oil-Palm Production (ICOP) Conference 2019 "Promoting Profitable Cattle and Oil-Palm Integration"*; 2019 Oct 23; Jakarta, Indonesia. Jakarta (ID): Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. hlm. 218-226.
- Bamualim AM, Madarisa F, Pendra Y, Mawardi E, Asmak. 2015. Kajian inovasi integrasi tanaman – ternak melalui pemanfaatan hasil ikutan tanaman sawit untuk meningkatkan produksi sapi lokal Sumatera Barat. *J Peternak Indones.* 17(2):83-93.
- [BPDPKS] Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. 2018. Tentang BPDPKS [Internet]. [Diunduh 2020 Jul 25]. Tersedia dari: <https://www.bpdp.or.id/category/tentang-bpdp>.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Hasil survei pertanian antar sensus (Sutas) 2018. Jakarta (ID): Badan Statistik Pertanian.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. *Statistik Indonesia*. Jakarta (ID): Badan Statistik Indonesia.
- Chang HSC, Panjaitan T, Sisriyeni D, Mahendri IGAP. 2020. Kajian potensi integrasi sapi-sawit di Riau: beberapa hasil awal. Dalam: Negara W, Harianto, Manalu LP, Widyastuti N, editors. *Prosiding Integrated Cattle and Oil-Palm Production (ICOP) Conference 2019 "Promoting Profitable Cattle and Oil-Palm Integration"*; 2019 Oct 23; Jakarta, Indonesia. Jakarta (ID): Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. hlm. 182-200.
- Dahono, Nuristina I, Ekalinda O, Agussalim, Hidayat T. 2019. Model pertanian bioindustri berbasis integrasi sawit-sapi di Provinsi Riau. *J Dinamika Pertan.* Ed khusus:9-18.
- Pinardi D, Mulyono D, Wahyuni DS, Surachman M. 2020. Development of palm oil-cattle integration program to support self-sufficiency of beef and development of human resources. *J Ilmu-Ilmu Peternak.* 30(1):40-49.
- Fahrial, Utama AS, Dewi S. 2019. Pemanfaatan corporate social responsibility (CSR) terhadap pembangunan perekonomian desa. *J Wawasan Yuridika.* 3(2):251-264.
- [GAPKI] Gabungan Pengusaha Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. 2020. Struktur kepengurusan: Dewan Eksekutif [Internet]. [diunduh 2020 Jul 25]. Tersedia dari: <https://gapki.id/apa-itu-gapki>.
- Hassan AAG, Ngah I, Applanaidu, SD. 2018. Agricultural transformation in Malaysia: The role of smallholders and area development. *World Bank - Agricultural Transformation and Inclusive Growth*. Selangor (MY): The Institute for Agricultural and Food Policy Studies, Universiti Putra Malaysia.
- Hidayat MI, Hidayat AAA. 2017. Analisis kelayakan usaha integrasi sapi potong dan perkebunan kelapa sawit di Desa Karang Taruna Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Dalam: Malaka R, Natsir A, Pakiding W, Purwanti S, Lestari VS, Sirajuddin SN, Nahariah, Dagong MIA, Hakim MR, editors. *Prosiding Seminar Nasional Peternakan 2017: Optimalisasi Sumberdaya Lokal Peternakan Rakyat dalam Mendukung Peternakan Berkelanjutan*; 2017 Sep 18; Makassar, Indonesia. Makassar (ID): Universitas Hasanuddin.
- Husnain, Nursyamsi D. 2015. Peranan bahan organik dalam sistem integrasi sawit-sapi. *J Sumberd Lahan.* 9(1):27-36.
- Ilham N. 2015. Ketersediaan produk samping tanaman dan industri pertanian sebagai pakan ternak mendukung peningkatan produksi daging nasional. *Forum Penelit Agro Ekon.* 33(1):47-61.
- Ilham N, Fuadi A, Novianti, Senoaji T, Khairunas, Firmana F, Fitriana V, Suminar R, Diyanti F, Nardi. 2016. Kajian sistem pertanian terpadu pola integrasi sawit-sapi mendukung pengembangan kawasan pertanian. Jakarta (ID): Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Ilham N, Saliem HP. 2011. Kelayakan finansial sistem integrasi sawit-sapi melalui program kredit usaha pembibitan sapi. *Anal Kebijak Pertan.* 9(4):349-369.
- Ilham N, Saptana, Winarso B, Supriadi H, Supadi, Saputra YH. 2014. Kajian pengembangan sitem pertanian terintegrasi tanaman ternak. *Laporan Penelitian*. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Indrayani I, Hellyward J. 2015. Optimalisasi produksi dan maksimalisasi keuntungan usaha ternak sapi potong dengan sistem integrasi sapi-sawit di Kabupaten Dharmasraya. *J Peternak Indones.* 17(3):187-194.
- Karimy MF, Suryani AE, Herdian H, Febrisiantosa A. 2014. Pengembangan integrated farming system berbasis sapi potong di Kabupaten Kaur – Provinsi Bengkulu. *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia [Internet]*. [diunduh: 07 Pebruari 2021]. Tersedia

- dari: <http://lipi.go.id/publikasi/pengembangan-integrated-farming-system-berbasis-sapi-potong-di-kabupaten-kaur---provinsi-bengkulu/20501>.
- Mahendri IGAP, Ashari, Ilham N, Wulandari S, Widiawati Y. 2020. Meningkatkan supply daging sapi dan kesejahteraan peternak rakyat melalui sistem integrasi sawit-sapi di Indonesia. Bogor (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan bekerja sama dengan Australian Centre for International Agricultural Research.
- Mahendri IGAP, Sisriyenni D. 2020. Pengembangan integrasi sapi-kelapa sawit untuk meningkatkan taraf hidup petani kecil di Riau, Indonesia. *J Ris Agribis Peternak*. 5(2):1-11.
- Malik RJ, Kardiyoanto E, Sani Y, Martindah E, Yusron M. 2017. Kajian sistem integrasi sapi sawit di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dalam: Puastuti W, Muharsini S, Inounu I, Tiesnamurti B, Kusumaningtyas E, Wina E, Herawati T, Hartati, Hutasoit R, editors. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner "Teknologi Peternakan dan Veteriner Mendukung Diversifikasi Sumber Protein Asal Ternak"*; 2017 Agu 8-9; Bogor, Indonesia. Jakarta (ID): IAARD Press. hlm. 238-247.
- Mayulu H, Sunarso, Sutrisno CI, Sumarsono, Christiyanto M, Isharyudono K. 2013. Potency of palm oil plantation and mill by product as ruminant feed in Paser Regency, East Kalimantan. *J Sci Eng*. 5(2):56-60.
- Nawfetriyas W, Djamas N, Surachman M. 2020. Deteksi Ganoderma spp. berbasis media seleksi pada fekes sapi dalam sistem integrasi sapi sawit. Dalam: *Prosiding Integrated Cattle and Oil-Palm Production (ICOP) Conference 2019 "Promoting Profitable Cattle and Oil-Palm Integration"* Jakarta, 23 October 2019. Editor: Negara W, Harianto, Manalu LP, Widyastuti N. Jakarta (ID): Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Nur TM, Fadli C, Satriawan H. 2018. Analisis potensi integrasi kelapa sawit-ternak sapi di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. *Agraris*. 4(2):69-80.
- [Pemprov Riau] Pemerintah Provinsi Riau. 2012. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau. Pekanbaru (ID): Pemerintah Provinsi Riau.
- [Pemprov Kalteng] Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 2018. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 43 Tahun 2018 tentang pengembangan ternak sapi potong melalui integrasi sawit-sapi pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Palangka Raya (ID): Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- [Pemprov Kep Babel] Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2019. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 43 Tahun 2019 tentang integrasi usaha sawit-sapi pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pangkal Pinang (ID): Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Saad MZ, Azhar K. 2015. Issues of Ruminant Integration with Oil Palm Plantation. *J Oil Palm Res*. 27(4):299-305.
- Saptana, Ilham N. 2015. Pengembangan sistem integrasi tanaman tebu-sapi potong di Jawa Timur. *Anal Kebijakan Pertan*. 13(2):147-165.
- Silalahi FRL, Rauf A, Hanum C, Siahaan D. 2018. The characteristic and problems of beef cattle – palm oil integration in Indonesia. *International Conference on Agribusiness, Food and Agro-Technology*. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 205 (2018) 012016 IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/205/1/012016. p1-10
- Soetopo D, Wulandari S. 2020. Answering some issues on oil palm productivity and ganoderma distribution regarding oil palm-cow integration system (Siska) implementation in smallholders. In: Negara W, Harianto, Manalu LP, Widyastuti N, editors. *Proceedings of Integrated Cattle and Oil-Palm Production Conference 2019: Promoting Profitable Cattle and Oil-Palm Integration*; 23 October 2019; Jakarta, Indonesia. Jakarta (ID): Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Saifuddin S, Suryadi F. 2017. Integration of oil palm and cattle for post conflict sustainable development international. *J Humanit Soc Sci*. 7(6):116-121.
- Sulistiawati R. 2018. Peningkatan kesejahteraan melalui kemandirian petani dalam pengelolaan integrasi sawit sapi berkelanjutan. *J Ekon Kuantitatif Terap*. 11(2):234-242.
- Utomo BN, Widjaja E. 2012. Pengembangan sapi potong berbasis industri perkebunan kelapa sawit. *J Penelit Pengemb Pertan*. 31(4):153-161.
- Zaimah R, Lyndon N, Sum SM, Hussain MY, Tohiran KA, Omar RZR, Dahari N, Desa H. 2017. Crop-livestock integration among the oil palm smallholders. *Oil Palm Ind Econ J [Internet]*. [cited 2021 Feb 16]; 17(1):7-15. Available from: https://www.researchgate.net/publication/320057915_Crop-livestock_Integration_among_the_Oil_Palm_Smallholders.